

# **Analisis Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung**

Oleh:

Hady Sutjipto

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E- mail :

## **ABSTRACK**

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional. Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan diantaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang..

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk memantapkan infrastruktur di kawasan pusat-pusat pertumbuhan yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, dan (2) Menganalisis dampak KEK pariwisata Tanjung Lesung untuk pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan analisa data lapangan yaitu (1) Infrastruktur perekonomian sangat penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan (2) Pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal melalui ecotourism maupun community based development.

Kata Kunci : KEK Tanjung Lesung, Infrastruktur Perekonomian, Ecotourism, Community Base Development

## **A.PENDAHULUAN**

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya

memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan

yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Pada tahun 2013 kunjungan wisatawan mencapai 18.072.420 orang, terdiri dari wisatawan mancanegara sebanyak 152.691 orang dan 17.919.729 wisatawan nusantara. Jumlah pergerakan wisatawan ke objek wisata di Provinsi Banten tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini .

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja subsektor perhotelan dan pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah, Provinsi Banten memiliki momentum peluang bagi tumbuhnya investasi baru pada sub sektor tersebut dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang. Penetapan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang KEK Pariwisata Tanjung Lesung pada tanggal 23 Februari 2012.

Infrastruktur yang sudah tersedia di KEK Pariwisata Tanjung Lesung yaitu jaringan jalan dalam kawasan, jaringan listrik, jaringan air bersih, air baku dan jaringan telekomunikasi. Dalam rencana aksi KEK pariwisata Tanjung Lesung yaitu bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan lain-lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan perekonomian masyarakat di KEK pariwisata Tanjung Lesung diharapkan memberikan dampak meningkatnya keterampilan dan pendapatan masyarakat.

Potensi ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Pandeglang sudah secara lengkap mendukung bagaimana wilayah ini akan dikembangkan di masa

**Tabel 1**

**Jumlah Pergerakan Wisatawan ke Objek Wisata di Provinsi Banten Tahun 2013**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WISATAWAN		
		WISNUS	WISMAN	JUMLAH
<b>Kabupaten :</b>				
1	Pandeglang	3.762.716	3.945	3.766.661
2	Lebak	50.092	123	50.215
3	Tangerang	54.891	24.392	79.283
4	Serang	10.810.938	110	10.811.048
<b>Kota :</b>				
5	Tangerang	340.234	84.617	424.851
6	Cilegon	78.186	22.291	100.483
7	Serang	2.822.671	17.207	2.939.483
8	Tangerang Selatan *)	-	-	-
<b>Provinsi Banten</b>		<b>17.919.729</b>	<b>152.691</b>	<b>18.072.420</b>

Sumber : Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Provinsi Banten  
Keterangan \*): Data tidak tersedia

mendatang. Hal tersebut dengan ditetapkannya beberapa bagian wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai kawasan strategis baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung merupakan salah satu kawasan strategis nasional dan provinsi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Pandeglang 2010-2030 telah ditetapkan 8 (delapan) kawasan strategis dalam rangka mendorong pengembangan wilayah. Diantaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga telah menetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang 2010-2030 adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengkajian terlebih dahulu tentang dampak dari kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung untuk pembinaan ekonomi desa, pemberdayaan teknologi tepat guna, dan berkembangnya kampung-kampung wisata sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, yaitu dengan pemberdayaan pembinaan, pengetahuan, dan sosialisasi KEK kepada masyarakat tentang kepariwisataan.

Melalui analisis dari hasil rekomendasi ini dapat bermanfaat untuk kebijakan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang terkena dampak di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung.

Pentingnya analisis pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung yaitu adanya masukan-masukan untuk kebijakan kedepannya sebagai berikut :

1. Untuk memantapkan infrastruktur di kawasan pusat-pusat pertumbuhan yaitu pemberdayaan perekonomian masyarakat di lingkungan kawasan

ekonomi khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung.

2. Menganalisis dampak KEK pariwisata Tanjung Lesung untuk pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat

## **B. Pembahasan**

### **1. Daya Dukung Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung**

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata tirta, wisata sejarah/budaya dan wisata suaka alam, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, cottage dan lain-lain yang banyak tersebar terutama di kawasan pesisir pantai Barat Banten.

Walaupun potensi pariwisata tersebut merupakan keunggulan Provinsi Banten, namun keunggulan tersebut tidak akan terwujud dengan sendirinya. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk merealisasikan keunggulan tersebut. Tantangan tersebut adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur itu sendiri memiliki spektrum yang sangat luas. Satu hal yang harus mendapat perhatian utama adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Banten.

Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat gerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitas ini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologi informasi dan komunikasi, serta seluruh regulasi dan aturan yang terkait.

Pengintegrasian sistem konektivitas untuk mendukung perpindahan komoditas, diperlukan integrasi simpul dan jaringan transportasi, pelayanan inter-moda

transportasi, komunikasi dan informasi serta logistik. Simpul-simpul transportasi (pelabuhan, terminal, stasiun, depo, pusat distribusi dan kawasan pergudangan serta bandara) perlu diintegrasikan dengan jaringan transportasi dan pelayanan sarana inter-moda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif. Jaringan komunikasi dan informasi juga perlu diintegrasikan untuk mendukung kelancaran arus informasi terutama untuk kegiatan perdagangan, keuangan dan kegiatan perekonomian lainnya berbasis elektronik.

Selain itu, sistem tata kelola arus barang, arus informasi dan arus keuangan harus dapat dilakukan secara efektif dan efisien, tepat waktu, serta dapat dipantau melalui jaringan informasi dan komunikasi (virtual) mulai dari proses pengadaan, penyimpanan/ pergudangan, transportasi, distribusi, dan penghantaran barang sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu dan tempat yang dikehendaki produsen dan konsumen, mulai dari titik asal (origin) sampai dengan titik tujuan (destination). Hal ini mencerminkan bahwa penguatan konektivitas regional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan serta dapat mendorong pemerataan antar daerah di Banten.

Oleh karena itu, daya dukung infrastruktur perekonomian sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Induk Pengembangan Wisata Provinsi Banten yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota termasuk salah satunya kawasan khusus ekonomi (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dapat digambarkan dari objek pembangunan infrastruktur yang akan dan telah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung sebagai berikut :

## 2. DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI BANTEN

Pelaksanaan pembangunan di bidang apapun termasuk Bidang Bina Marga dan

Tata Ruang tentu selalu menghadapi permasalahan – permasalahan. Transportasi menjadi isu yang sangat kritis pada saat ini di Provinsi Banten khususnya dan di Indonesia umumnya. Penurunan kondisi jalan, kondisi jembatan, anggaran yang ketat, pertumbuhan penduduk, pelanggaran muatan, kerusakan dini, pertumbuhan jumlah kendaraan dan permasalahan lainnya membutuhkan penanganan dengan perencanaan yang efisien dan terukur.

Dalam mewujudkan jaringan jalan provinsi dalam kondisi 100 % mantap dan peningkatan aksesibilitas kawasan melalui penambahan kapasitas jaringan jalan guna mendukung pengembangan wilayah, maka strategi peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan melalui penganggaran tahun jamak berdasarkan Perda Provinsi Banten No. 2 Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak.

Gambaran rencana pengembangan infrastruktur jalan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini

**Gambar 1**  
**Pengembangan Infrastruktur Jalan**  
**Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**  
**Pariwisata Tanjung Lesung**



Sumber : Data diolah Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten Tahun 2012

## 2. DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Berkembangnya daerah permukiman dan industri pariwisata dapat

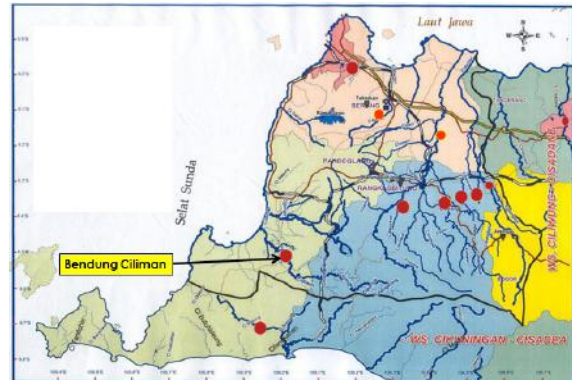
menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air. Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri pariwisata yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang berlebihan sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

Hasil kajian Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten terkait penyediaan air baku kawasan Tanjung Lesung yang direncanakan mengambil sumber pada sungai Ciliman, untuk menentukan alternatif terbaik suatu sistem distribusi air baku di KEK Tanjung Lesung berdasarkan kondisi saat ini dengan biaya terjangkau dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin.

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliman dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi seluas 5.315 Ha. DAS hulu sungai Ciliman untuk memenuhi kebutuhan irigasi, sementara pemanfaatan sisa DAS sungai Ciliman di hilir bendung Ciliman untuk kebutuhan suplay KEK Tanjung Lesung. Luapan banjir terjadi dari Sungai Ciliman di bendung, sehingga pembuatan bendung karet bisa dijadikan alternatif pembuatan bendung. Untuk mengatasi bulan kering diperlukan tampungan di hulu Ciliman (Desa Tanjung Jaya) seluas 50 Ha. Dalam bentuk long storage di hulu sungai Ciliman.

Analisis data pemanfaat air bendung di hilir bendung Ciliman, untuk kebutuhan Kawasan KEK Tanjung Lesung sebesar 430.311 L/detik. Sistem jaringan air baku untuk air bersih pada rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air KEK Tanjung Lesung diarahkan pada pemanfaatan air permukaan dengan saluran masuk di sungai Ciliman yang potensial.

**Gambar 2**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air KEK Tanjung Lesung**



Sumber : Data diolah Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukiman Tahun 2012

## 2. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN

Berkembangnya sektor pariwisata mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat lokal akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya. Meningkatnya kebutuhan listrik ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di KEK Tanjung Lesung yang cukup tinggi, khususnya di bidang pariwisata. Sejumlah hotel dan industri wisata lainnya akan berdiri di Tanjung Lesung akan banyak membutuhkan listrik.

Provinsi Banten saat ini merupakan salah satu daerah dengan jumlah pembangkit tenaga listrik terbanyak yang memasok tenaga listrik untuk keperluan listrik Pulau Jawa Madura dan Bali. Kapasitas terpasang pembangkit yang sudah ada saat ini yang tersambung ke jaringan

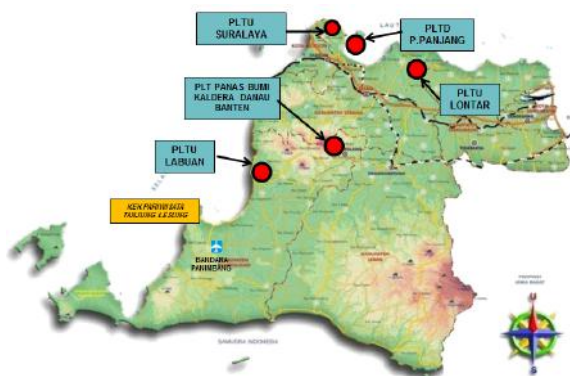
transmisi interkoneksi Jawa-Madura dan Bali sebesar 6.310 MW, dengan rincian pembangkit sebagai berikut, yaitu :

PLTU Suralaya	: 3.400	MW
PLTU Suralaya Perluasan	: 625	MW
PLTU Labuan 1 dan 2	: 600	MW
PLTU Lontar	: 945	MW
PLTGU Bojonegara	: 740	MW

Selain pembangkit yang sudah tersambung ke jaringan transmisi interkoneksi Jawa-Madura dan Bali tersebut diatas, terdapat pula pembangkit *Captive* beberapa perusahaan untuk keperluan sendiri (industri), yaitu :

PLTGU KD	: 400 MW (100 MW <i>on Grid</i> )
PLTU Tifico	: 47 MW
PLTU Indah Kiat	: 132 MW
PLTU Nicomas	: 8 MW
PLTU Chandra Asri	: 8 MW
PLTD Pulau Panjang	: 125 kW (untuk keperluan masyarakat)

**Gambar 3**  
**Pengembangan Sumber Daya Energi Listrik di Provinsi Banten**



Sumber : Data diolah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten Tahun 2012

## 2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN

Keberadaan institusi Badan Lingkungan Hidup nampaknya menjadi kebutuhan dalam upaya mendorong pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menjadi lebih baik dan terencana sehingga mampu melihat dan mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi, maka peran institusi ini sangat penting dan

strategis.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung yang merupakan wilayah pesisir, pantai dan laut, maka harus diantisipasi dari segala kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jika dilihat dari asal kejadiannya, jenis kerusakan lingkungan di pesisir, pantai dan laut bisa berasal dari luar sistem wilayah pesisir, pantai dan laut maupun yang berlangsung di dalam wilayah pesisir, pantai dan laut itu sendiri. Pencemaran yang terjadi di wilayah daratan akan terbawa oleh aliran sungai masuk ke muara dan akhirnya tersebar ke seluruh pantai dan pesisir di sekitarnya.

Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir; dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu. Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Dari keseluruhan panjang pantai yang dimiliki oleh Provinsi Banten beberapa diantaranya mengalami abrasi. Adapun abrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung terjadi di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur yang terjadi sebagian besar diakibatkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia seperti kegiatan pertambangan, penebangan hutan mangrove, maupun penggalian pasir pantai.

## 3. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu

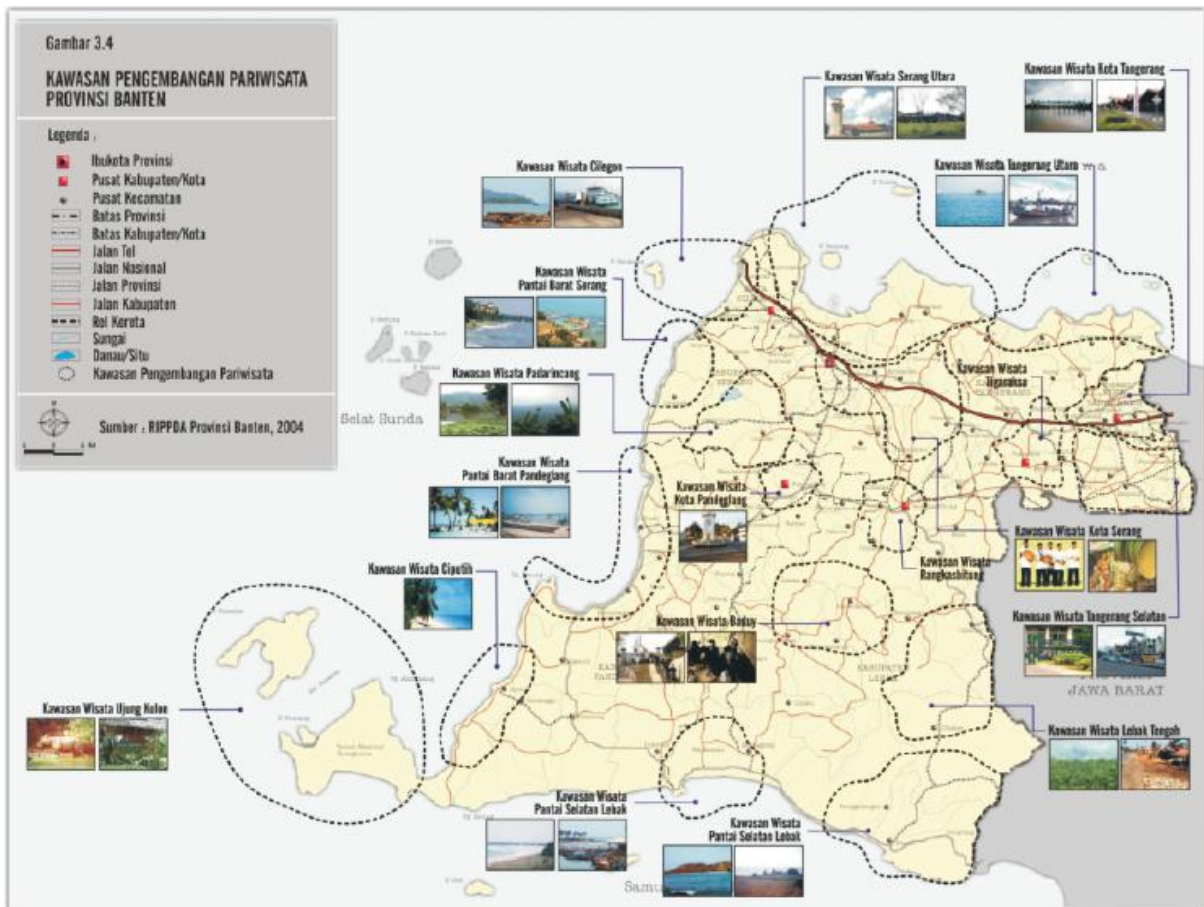
daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema *paid holidays*.

Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten diidentifikasi atas 204 Obyek

Daya Tarik Wisata (ODTW) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Banten. Terdiri dari 84 Obyek Wisata Alam, 34 Obyek Wisata Sejarah dan Budaya, 24 Obyek Wisata Buatan, 9 Obyek Wisata *Living Culture* dan 48 Obyek Wisata Atraksi Kesenian. Sebanyak 71 ODTW (34,8%) merupakan kawasan wisata yang telah berkembang baik dalam skala nasional maupun internasional. Sementara itu sekitar 100 ODTW (49,0%) merupakan Obyek Wisata yang potensial untuk dikembangkan. Pola pengembangan pariwisata Provinsi Banten meliputi 18 kawasan, diantaranya Pantai Barat, Kawasan Wisata Pantai Selatan, Kawasan Wisata Pantai Utara, Kawasan Wisata Ziarah, Kawasan Wisata Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) serta Pulau dan Anak Gunung Krakatau, dan lain-lain.

**Gambar 4**  
**Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Banten**



Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 201

## 2. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

Hasil telaahan terhadap rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis dan arahan kebijakan ruang, menunjukkan bahwa Provinsi Banten yang berada di wilayah ujung barat Pulau Jawa, memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, tidak saja berskala lokal, regional, dan nasional, bahkan terdapat potensi yang berskala internasional. Beberapa potensi unggulan nasional berada di Wilayah Provinsi Banten antara lain sektor pariwisata, industri dan pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan

Dari waktu ke waktu perkembangan mobilitas masyarakat Banten dan kunjungan masyarakat dari daerah lain ke wilayah Provinsi Banten menunjukkan adanya peningkatan yang relatif tinggi. Seiring dengan pertumbuhan kepadatan perjalanan tersebut, menuntut dukungan pelayanan transportasi jalan yang lebih baik, khususnya terhadap pengembangan pelayanan angkutan penumpang umum yang ada untuk menjadi lebih memadai, sehingga terciptanya suatu sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan tata ruang; peningkatan peran angkutan umum perkotaan; peningkatan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas perkotaan; dan peningkatan transportasi perkotaan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Secara umum kendala utama angkutan kereta api adalah terbatasnya jumlah armada, kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian yang tidak handal karena *backlog* perawatan, peran dan share angkutan kereta api yang masih rendah, kurangnya keterpaduan dengan moda transportasi serta masih minimnya peran swasta maupun Pemda dalam hal pembangunan perkeretaapian Indonesia.

### a. Konsep Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Pengembangan wilayah dalam proses pembangunan diperlukan karena terdapat perbedaan kondisi masing-masing wilayah serta potensi yang berbeda-beda, baik potensi sumberdaya alam, manusia, maupun sosial budaya, sehingga diperlukan suatu proses.

Melalui perencanaan wilayah yang tepat diharapkan dapat tercapai pendayagunaan potensi sumberdaya secara optimal, mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Pendekatan pengembangan wilayah terdiri dari dua konsep, yaitu konsep pembangunan dari atas (*development from above*) dan konsep pembangunan dari bawah (*development from below*). Konsep pembangunan dari atas bermula dari pemikiran bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan di semua titik, sehingga harus dipilih titik-titik tertentu sebagai pusat pertumbuhan (*growth center*). Konsep ini lebih banyak mengandalkan inisiasi dan peran dari pemerintah serta bersifat sentralistik. Namun dalam kenyataannya konsep ini cenderung menimbulkan ketimpangan antar wilayah karena terjadinya *leakages* atau kebocoran, yaitu sumberdaya banyak yang bocor ke daerah yang lebih maju dan tidak kembali ke daerah asalnya.

Sedangkan konsep pembangunan dari bawah lebih menekankan pada partisipasi dan peran masyarakat/komunitas lokal serta bersifat desentralistik. Konsep ini sejalan dengan otonomi daerah, dimana daerah lebih mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Pembangunan dilakukan di wilayah yang paling memerlukan pengembangan dengan sektor yang terintegrasi. Komunitas-komunitas lokal yang ada, mengembangkan wilayah melalui gagasan mereka sendiri. Penekanan pembangunan pada pemenuhan basic need

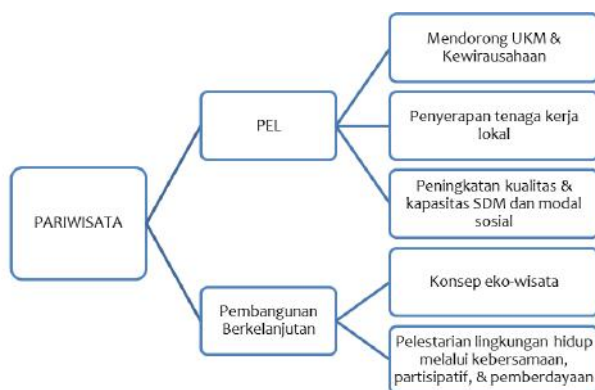


(kebutuhan dasar) penduduk (Firman, 2010). Beberapa konsep pembangunan dari bawah antara lain: konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau *Local Economic Development*, konsep Pengembangan Komunitas (*Community Development*) dan Konsep Pengembangan Agropolitan.

Konsep pengembangan ekonomi lokal muncul karena keterbatasan kebijakan nasional untuk memecahkan masalah keragaman sumberdaya, karakteristik daerah dan perilaku manusia. Sehingga diperlukan keterlibatan lebih luas komunitas lokal dalam kegiatan ekonomi serta keterlibatan kelembagaan lokal dalam mengakses, mengolah dan mengontrol sumberdaya di daerah (Firman, 2010). Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada kekuatan sumberdaya setempat tanpa mengabaikan perkembangan global.

Sehingga pengembangan untuk Kabupaten Pandeglang berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung sebagai berikut:

**Gambar 5**  
**Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan**



Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012

Pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung sebagai *leading sector* yang berdaya saing global dengan prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki

sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya *One Stop Tourism* yang diminati wisatawan mancanegara
- Mampu menjadi pasar dari produk agroindustri
- Meningkatkan posisi masyarakat lokal sebagai *shareholder* dan produsen barang dan jasa yang terkait pariwisata
- Tetap terjaga kualitas lingkungan sebagai modal dasar pariwisata

Adapun pembangunan ekonomi lokal dengan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan KEK Pariwisata Tanjung Lesung diperkirakan mencapai 200.000 pekerja. Dampak langsung Tanjung Lesung mencapai 85.000 pekerja. Dampak langsung Jalan Tol Serang-Panimbang mencapai 5.000 pekerja. Dan dampak tidak langsung dari sektor lainnya sekitar 75.000 pekerja (Sumber: Sosialisasi KEK Tanjung Lesung Bappeda Kabupaten Pandeglang).

Sementara konsep **eko-wisata** lebih populer dibanding dengan terjemahan yang seharusnya dari istilah *ecotourism*, yaitu ekoturisme, yang pada tahun 1990 oleh *the ecotourism society* didefinisikan sebagai bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang, yang dilakukan untuk tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan untuk kesejahteraan penduduk setempat.

Implikasi definisi di atas menegaskan dua hal penting dalam rangka pengembangan ekowisata dari perspektif jasa pelayanan yaitu *pertama*, produk ekowisata disebut sebagai jasa pelayanan (*service*) “terpadu”. pelayanan dimaksud secara implisit dapat terlihat dari *multiple-mission* yang diemban oleh pembangunan pariwisata di Indonesia (lihat; Nirwandar 2007), diantaranya *tourism* sebagai industri diharapkan akan mampu menyediakan jasa layanan alam dan lingkungan (*supply of environmental service*) tanpa mengubah fungsi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (*local needs*). *Kedua*,

produk ekowisata disebut sebagai jasa pelayanan dalam rangka menciptakan kepuasan (*demand experiential of phenomenal*) bagi wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata.

Implikasi pertama (*supply*), sebagai faktor prasyarat yang harus tersedia agar atribut pelayanan dapat terwujud, Seperti faktor sarana-prasaranan, faktor obyek dan daya tarik wisata alam, serta faktor kenyamanan, syahadat (2006). Sedangkan implikasi yang kedua, menunjukkan bahwa kepuasan wisatawan menjadi prioritas dalam penyajian jasa layanan ekowisata, diindikasikan sebagai *experiential of phenomenal*, yang oleh fennell (2002) disebut kebutuhan psikologis pengunjung.

Konsep ekowisata diatas coba dituangkan dalam rencana pengembangan wilayah di KEK Pariwisata Tanjung Lesung, dimana impelmentasinya konsepnya adalah dengan mengembangkan objek wisata alam (pesisir, cagar alam dan kepulauan) skala internasional secara lestari dengan melibatkan masyarakat sebagai *shareholder* utama sehingga dapat menjadi penopang untuk perekonomian yang berkelanjutan khususnya peningkatan ekonomi wilayah belakang.

Adapun konsep **Community Based Development** adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable*. Secara umum *community based development* (CBD) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Program *Community Based Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan

(*sustainable*). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), kesemuanya berjalan secara simultan.

Perwujudan konsep *Community Based Development* di KEK Pariwisata Tanjung Lesung secara konkrit adalah dengan mengembangkan agroindustri berkelanjutan melalui pentahapan yang jelas sesuai komoditas yang telah dibudidayakan dengan memberdayakan masyarakat dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Kedua konsep tersebut, baik *ecotourism* maupun *community based development* memiliki sinergisitas pada unsur perlunya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wilayah. Pengembangan pariwisata dengan konsep *ecotourism* dijabarkan melalui bentuk wisata teknologi dan kuliner khas, wisata budaya, wisata cagar alam dan petualangan, wisata konvensi dan pesisir, wisata agro dan ziarah. Sedangkan pengembangan agroindustri dengan *konsep community based development* dijabarkan melalui kegiatan budidaya komoditas unggulan, pengolahan, pemasaran, agrowisata dimana sinergisitas antara pariwisata dan agroindustri tersebut adalah terletak pada pengembangan agrowisata.

### C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini berdasarkan analisa data lapangan yaitu :

1. Infrastruktur perekonomian sangat penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di

- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pengembangan pemberdayaan perekonomian masyarakat untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung berdasarkan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal melalui *ecotourism* maupun *community based development*.
- Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Daya Dukung Infrastruktur KEK Pariwisata Tanjung Lesung**

No	Instansi	Dukungan yang Diharapkan
1	Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang, Dinas Sumberdaya Air dan Pemukiman	Dukungan pengembangan infrastruktur jalan, dan fasilitas akomodasi serta sanitasi di KEK Pariwisata Tanjung lesung
2	Dinas Pertambangan dan Energi	Ketersediaan infrastruktur kelistrikan di KEK Pariwisata Tanjung Lesung
3	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Dukungan penyediaan transportasi umum, terminal dan telekomunikasi serta mewujudkan perencanaan pembangunan jalan tol Panimbang dan Bandar Udara Banten Selatan
4	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Penilaian AMDAL terhadap industri pariwisata (Hotel, Restoran, Tempat Hiburan) terdapat pencemaran keanekaragaman hayati dan ekosistem KEK Pariwisata Tanjung Lesung
5.	Dinas Pertanian dan Peternakan	Dukungan penyediaan produk hasil pertanian dan peternakan dalam mendukung kebutuhan kuliner sektor pariwisataTanjung Lesung

Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2012

**Tabel 6**  
**Model Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat KEK Pariwisata Tanjung Lesung**

No	Bidang	Arah Pengembangan
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian Sekolah Pariwisata (Setingkat Diploma III/Akademi Pariwisata)</li> <li>2. Peningkatan kualitas SMK Pariwisata di Kabupaten Pandeglang</li> <li>3. Peningkatan Keterampilan Masyarakat (Kerajinan Tangan/Cendera Mata/Oleh-Oleh)</li> <li>4. Pengembangan dan pembinaan Sanggar Budaya</li> <li>5. Penyuluhan Sadar Wisata secara berkala</li> <li>6. Pelatihan Pemandu Wisata dan bahasa asing</li> </ol>
2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Tanah Rest Area sebagai pusat informasi dan pusat kerajinan tangan dan oleh-oleh</li> <li>2. PNPM Mandiri Desa Wisata (Desa Citereup)</li> <li>3. Peningkatan kualitas pasar Citereup</li> <li>4. Pembangunan sub terminal Panimbang</li> <li>5. Peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten</li> </ol>
3	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Usaha Ekonomi Desa (Kecamatan panimbang, Sobang, Cigelis, Sukaresmi)</li> <li>2. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (Kec. Panimbang, Sobang, Cigelis, Sukaresmi)</li> <li>3. Intensifikasi Usaha Hutan (Desa Tanjung Jaya, Citereup)</li> <li>4. Optimalisasi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran Ikan (Desa Citereup, Mekarsari, Panimbang Jaya, Sidamukti)</li> <li>5. Sosialisasi/Diseminasi KEK Tanjung Lesung kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama</li> <li>6. Terbentuknya Kampung-Kampung Wisata (Kp. Cikadu)</li> </ol>

Sumber : Data diolah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2012

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Banten Dalam Angka*, Tahun 2014
- \_\_\_\_\_, Kabupaten Pandeglang Dalam Angka Tahun 2014
- \_\_\_\_\_. Statistik Daerah Pandeglang 2014
- Bappeda Provinsi Banten. 2012. *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2012-2030*
- Bank Indonesia, *Laporan Kajian Ekonomi Regional Banten*, Tahun 2012-2014
- Dikun, Suyono. 2003. *Infrastruktur Indonesia : Sebelum, Selama, dan Pasca Krisis*. Jakarta : Kementerian Negara PPN/BAPPENAS.
- Indra N. Fauzi. 2003. *Persepsi Pelaku Usaha Terhadap Iklim Usaha di Era Otonomi Daerah*. Konferensi PEG-USAID. Jakarta
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2011. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025*. Jakarta
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat

Mudrajad Kuncoro. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.

Pemerintah Provinsi Banten. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

Tulus Tambunan. 2006. *Iklm Investasi di Indonesia: Masalah, tantangan, dan Potensi*. Kadin Indonesia-Jetro.